

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

Penelitian ini berfokus pada pendampingan pembuatan legalitas Nomor Izin Berusaha (NIB) UMKM Bakso 2F milik Ibu Diana Listiana Yusup di Desa Banjarmasin. Berdasarkan hasil pelaksanaan dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

##### **1. Kegiatan Pengabdian Masyarakat Melalui Program Pendampingan Legalitas Usaha**

Berhasil membantu UMKM Bakso 2F dalam memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS RBA. Hal ini membuktikan bahwa permasalahan utama mitra, yaitu ketiadaan legalitas usaha, dapat teratasi dengan adanya pendampingan yang tepat.

##### **2. Pemahaman Pemilik UMKM Meningkatkan Signifikan**

Sebelum kegiatan dilaksanakan, pemilik belum memahami manfaat NIB dan tidak mengetahui cara pendaftaran di OSS RBA. Setelah dilakukan sosialisasi dan praktik pendampingan, pemilik dapat mengetahui langkah-langkah pendaftaran dan memahami bahwa NIB menjadi syarat utama untuk mengembangkan usaha secara legal.

##### **3. Manfaat Langsung Yang Diperoleh UMKM Bakso 2F**

Meningkatnya kepercayaan konsumen, terbukanya akses pembiayaan ke lembaga keuangan, peluang untuk mengikuti program-program pemberdayaan UMKM dari pemerintah, serta kesempatan mengurus perizinan lanjutan seperti PIRT dan sertifikasi halal. Dengan demikian, keberadaan NIB tidak hanya berfungsi sebagai identitas usaha, tetapi juga sebagai kunci untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan daya saing.

#### **4. Masyarakat Sekitar Turut Merasakan Dampak Positif**

Yaitu meningkatnya kesadaran akan pentingnya legalitas usaha. Keberhasilan UMKM Bakso 2F menjadi contoh nyata bagi pelaku usaha lain untuk mulai mengurus legalitas usaha mereka. Hal ini diharapkan dapat menciptakan iklim usaha desa yang lebih tertata, memiliki kepastian hukum, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih sehat.

#### **5. Bagi mahasiswa PKPM**

Kegiatan ini memberikan pengalaman praktis yang sangat berharga. Mahasiswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga terjun langsung mendampingi pelaku UMKM dalam proses pendaftaran NIB. Hal ini melatih keterampilan administrasi, komunikasi, koordinasi, serta pemecahan masalah. Mahasiswa juga memperoleh pemahaman baru tentang sistem OSS RBA dan regulasi terkait legalitas usaha, yang akan menjadi bekal penting di dunia kerja maupun saat melakukan pengabdian di masa mendatang.

#### **6. Secara Keseluruhan, Kegiatan Ini Menciptakan Sinergi Antara Mahasiswa, UMKM, Masyarakat, Dan Pemerintah Desa**

Sinergi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi UMKM dapat diatasi melalui kerja sama yang baik dan pendampingan yang berkesinambungan. Keberhasilan kegiatan ini juga menegaskan bahwa legalitas usaha merupakan aspek penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa yang berkelanjutan.

### **3.2 Saran**

#### **1. Untuk UMKM Bakso 2F**

Pemilik usaha diharapkan dapat menjaga legalitas yang sudah diperoleh dengan terus memanfaatkan NIB sebagai dasar dalam mengembangkan usaha. Selain itu, penting untuk mulai menerapkan pencatatan keuangan

sederhana, memperluas pemasaran melalui media digital, serta menjaga kualitas produk agar lebih kompetitif.

## **2. Untuk Desa Banjarmasin**

Desa Banjarmasin disarankan untuk lebih aktif mendorong UMKM lain agar mengurus legalitas usaha melalui OSS RBA. Pemerintah desa juga dapat memfasilitasi pelatihan rutin, pendampingan pemasaran digital, serta membantu menghubungkan UMKM dengan lembaga permodalan maupun koperasi desa.

### **3.3 Rekomendasi**

#### **1. Untuk UMKM Bakso 2F**

Disarankan agar pemilik usaha segera melengkapi dokumen usaha lain yang dibutuhkan, seperti PIRT dan sertifikasi halal, sehingga dapat memperluas pasar dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Selain itu, pemanfaatan platform e-commerce perlu terus dioptimalkan agar produk lebih dikenal secara luas.

#### **2. Untuk Aparatur Desa Banjarmasin**

Aparatur desa direkomendasikan untuk membuat program desa berbasis pemberdayaan UMKM, misalnya dengan membentuk kelompok usaha bersama atau forum komunikasi UMKM. Dengan begitu, UMKM dapat lebih mudah memperoleh informasi, pelatihan, serta dukungan yang terkoordinasi dari pemerintah desa.